

PEMBANGUNAN SEBAGAI MODERNISASI: PANDANGAN KRITIS TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Febri Puja Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : April 2025

Revised : April 2025

Accepted : April 2025

Available online

Korespondensi: Email:

febripuja.2024@student.uny.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Infrastructure development in Indonesia is an indicator of a country's progress. However, in its implementation there are various obstacles and challenges faced by the government and society. This article will discuss a critical view of infrastructure development in Indonesia as a modernization effort. Infrastructure development in Indonesia faces problems in social, economic and environmental aspects. Various policies and strategies need to be adopted to optimize infrastructure development in the context of modernization efforts.

Keywords: *three to five words or phrases that it's important, specific, and representative for the article.*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Artikel ini akan membahas tentang pandangan kritis terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai upaya modernisasi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi masalah dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai kebijakan dan strategi perlu diadopsi untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka upaya modernisasi.

Kata kunci: Pembangunan, Infrastruktur, Modernisasi, Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan seperti ini tidak selalu membawa manfaat semata-mata bagi masyarakat. Sebaliknya, terdapat pandangan kritis yang menyoroti dampak negatif yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari transformasi ini.

Menurut Samuel Huntington, modernisasi adalah “proses yang kompleks dan kontroversial” yang melibatkan “perubahan-perubahan kepribadian, sosial, dan kelembagaan terkait dengan transfer teknologi, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi” (Huntington, 1968). Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu aspek modernisasi yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dan kelembagaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang netral atau tanpa konsekuensi. Perubahan ini juga dapat memengaruhi hubungan antara masyarakat dan lingkungannya. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat mempercepat proses modernisasi, namun, di sisi lain, dapat pula memperburuk ketimpangan dan kesenjangan ekonomi serta dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Dalam artikel ini, akan diulas

pandangan kritis terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks makalah ini, metode analisis kritis dapat membantu penulis mempertimbangkan perspektif yang berbeda terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk manfaat dan dampak negatifnya serta kesesuaiannya dengan konteks sosial dan ekonomi Indonesia. Dalam proses analisis ini, penulis dapat menggunakan data dan informasi terkini untuk mendukung argumen dan kesimpulan yang ditarik, serta memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pembangunan infrastruktur dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara prasarana atau fasilitas yang berhubungan dengan transportasi, utilitas, serta lingkungan suatu wilayah guna mempercepat dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial. Adapun pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur meliputi beberapa sektor seperti jalan dan jembatan, jaringan listrik, air minum, telekomunikasi, dan fasilitas transportasi publik lainnya. Infrastruktur yang memadai dapat menghubungkan suatu wilayah yang terisolasi, membuka akses pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur juga dianggap penting untuk mempercepat konsep "Indonesia Digital" dan untuk mendorong adopsi teknologi sehingga Indonesia bisa terus bertahan di era globalisasi dan persaingan global. Dengan begitu banyaknya masalah sosial dan ekonomi yang masih menjadi persoalan di Indonesia seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kerentanan terhadap bencana alam, pembangunan infrastruktur juga mungkin membawa beberapa konsekuensi negatif seperti kerentanan lingkungan, kerusakan alam dan dampak negatif yang seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku sektor terkait. Pembangunan infrastruktur perlu ditekankan dengan pandangan kritis sehingga dampak negatifnya dapat dihindari dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki peran penting bagi kemajuan negara dan masyarakat Indonesia. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Indonesia, membuka akses pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan, dan akses yang lebih mudah ke fasilitas dan layanan publik.

Peningkatan infrastruktur juga dapat mendorong investasi asing dan lokal, yang dapat membuka peluang baru bagi industri nasional sehingga berkontribusi terhadap pembangunan kawasan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menstabilkan harga-harga barang dan jasa yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, seperti harga bahan bakar minyak, biaya transportasi, dan harga makanan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga dianggap penting untuk mencapai visi "Indonesia Digital" yaitu bagaimana adopsi teknologi yang berkelanjutan bisa meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, peningkatan infrastruktur digital mencakup internet berkecepatan tinggi, aplikasi, platform, dan sistem elektronik terpadu, serta digitalisasi administrasi publik, perbankan, perdagangan, dan layanan sosial. Perlu dicatat bahwa pembangunan infrastruktur harus diatur dengan hati-hati karena

ada kemungkinan efek negatif, seperti kerusakan lingkungan dan kepentingan ekonomi yang merusak serta ketidakseimbangan ekonomi antara wilayah yang maju dan terbelakang.

Dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, masalah sosial menjadi kendala dan tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, beberapa masalah sosial yang mungkin timbul dalam pembangunan infrastruktur yaitu:

1. Permasalahan pembebasan lahan yang seringkali berujung pada konflik dengan pemilik atau masyarakat setempat. Terkadang, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dapat mencederai hak-hak sipil masyarakat dan menyisakan persoalan hukum yang panjang. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku sektor terkait harus memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan.
2. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur biasanya terfokus pada daerah perkotaan, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk perkotaan dalam mengakses lebih banyak peluang lapangan kerja, sementara masyarakat pedesaan masih tertinggal dalam peningkatan standar hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan untuk menciptakan kemampuan dan peluang yang setara untuk tumbuh dan berkembang.
3. Dampak negatif bagi lingkungan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan faktor lingkungan dapat menimbulkan dampak buruk pada ekosistem lokal, memicu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, bahkan dapat mempengaruhi ketahanan pangan.

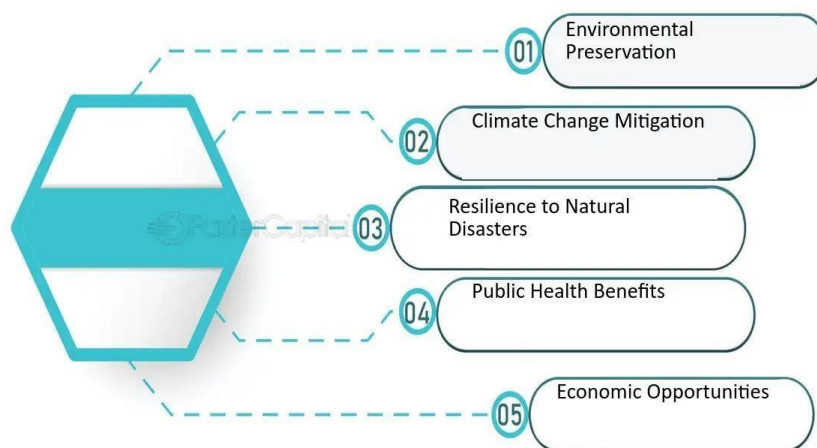
Kendala ekonomi menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa kendala ekonomi yang dapat terjadi yaitu:

1. Anggaran yang terbatas dan tak jarang tidak mencukupi. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur terbatas, hal ini menyebabkan perlu dilakukan prioritas bagi pembangunan infrastruktur yang kritis dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Masalah perencanaan yang tidak matang. Masalah perencanaan yang tidak matang akan menyebabkan anggaran yang telah disiapkan tidak optimal, hal ini dapat memperlambat proses pembangunan dan malah mendatangkan kerugian yang besar.
3. Rendahnya dampak ekonomi. Terkadang hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, hal ini dapat mengakibatkan pembangunan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Untuk mengatasi kendala ekonomi dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya seperti:

1. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan prioritas dan menghasilkan *outcome* yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang matang melalui analisis yang cermat dan sinkronisasi antar sektor, institusi dan pihak terkait.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil pembangunan infrastruktur untuk memastikan dampak dan pencapaian tujuannya sesuai dengan harapan.

Incorporating Environmental Considerations in Infrastructure Planning



Gambar 1. Pertimbangan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur

Pertimbangan lingkungan menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar, antara lain kerusakan hutan, penghancuran habitat satwa liar, polusi air dan udara, serta lahan hijau. Perlu dilakukan pertimbangan lingkungan yang matang pada setiap tahap pembangunan infrastruktur, sebelum, selama, dan setelah proyek telah selesai. Beberapa cara untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penghematan energi. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menurunkan biaya pengoperasian infrastruktur. Hal ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menitikberatkan aksesibilitas pada transportasi berkelanjutan yang meminimalkan konsumsi bahan bakar fosil.
2. Evaluasi dampak lingkungan. Evaluasi dapat menilai dampak proyek terhadap lingkungan, sehingga dapat diperoleh solusi untuk membatasi kerusakan. Dampak harus dinilai secara menyeluruh, termasuk dampak pada sumber daya alam, habitat keanekaragaman hayati, dan masyarakat setempat.
3. Pembentukan Green Infrastructure. Melakukan pengkategorian ekosistem di sekitar lokasi bangunan atau infrastruktur dan melakukan perencanaan konservasi ekosistem dalam penggalangan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi daerah terdampak.
4. Partisipasi masyarakat. Pihak terkait sebelum memulai pembangunan, harus meminta masukan dari masyarakat sekitar proyek dan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan negatif yang mungkin terjadi.
5. Melindungi dan memperhatikan lingkungan selama pembangunan infrastruktur dapat membantu menghindari masalah lingkungan saat pembangunan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan pada masa depan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kebijakan pendukung telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan efisien. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan oleh pemerintah adalah penerapan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPSP) dalam pembangunan infrastruktur. Dalam skema ini,

pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur. KPSP telah terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol, bandara, pelabuhan dan rel kereta api. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai insentif fiskal untuk mendorong investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Insentif ini termasuk perpajakan yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak penghasilan dan pembebasan pajak pertambahan nilai. Pemerintah juga memberikan regulasi dan lisensi yang cepat dan mudah untuk melindungi bisnis dan investor. Ada juga kebijakan untuk mempercepat proses perizinan dan persetujuan untuk proyek infrastruktur. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang menetapkan bahwa proses perizinan dan persetujuan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk menghapus hambatan birokrasi dan memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan cepat dan terhindar dari penundaan yang tidak perlu. Pemerintah juga mengembangkan program pembiayaan infrastruktur yang bernama PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Ketiga perusahaan tersebut bertindak sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur yang mendukung proyek-proyek melalui pembiayaan dan pemberian jaminan pinjaman. Program ini bertujuan untuk memungkinkan akses yang lebih mudah ke pembiayaan infrastruktur bagi sektor swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan perluasan dan penyempurnaan jalan nasional dan tol dalam upaya meningkatkan konektivitas. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan aksesibilitas bandara dan pelabuhan dengan cara meningkatkan ketersediaan moda transportasi umum seperti kereta api, bus, dan kapal laut. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur digital, seperti telekomunikasi dan internet, yang dianggap kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah berencana membangun infrastruktur yang lebih baik untuk mengakses teknologi internet yang lebih cepat dan andal di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun terdapat berbagai kebijakan pendukung dari pemerintah, masih ada tantangan yang dihadapi dalam hal mempercepat pembangunan infrastruktur. Beberapa di antaranya termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tingginya biaya pembiayaan proyek infrastruktur, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, serta peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan regulasi dan koordinasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif di masa depan.

SIMPULAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai upaya modernisasi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Namun, dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur masih dihadapkan kepada berbagai kendala dan tantangan. Masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, adopsi kebijakan dan strategi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka upaya modernisasi. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, yaitu bagaimana pembangunan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan harus diikutsertakan, sehingga

pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat terutama yang berada di wilayah yang kurang berkembang. Pemerintah juga harus mendorong terjadinya transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. SDM yang unggul akan mampu menjamin kualitas pembangunan yang baik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pendidikan mengenai teknologi menjadi hal yang esensial agar seluruh sumber daya manusia Indonesia siap dan terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur yang lebih maju. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, dengan adopsi kebijakan dan strategi yang tepat, serta dukungan dari masyarakat, pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan dapat menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ma'mur, A. (2017). "Pembangunan Infrastruktur di Indonesia sebagai Tantangan Bagi Masyarakat Adat". *Jurnal Kajian Kebijakan Sosial dan Ekonomi*, 5(2), 135-150.
- Manap, N. A., Ishak, R., Yusoff, N. M., & Ahmad, K. (2020). "The role of government and private sector in infrastructure development in developing countries: A review". *Journal of Public Administration and Governance*, 10(1), 303-318.
- Breslin, S. (2018). "The power of infrastructure: China's Belt and Road Initiative". *Global Policy*, 9(1), 114-125.
- Purwandari, R. D. (2019). "Memberantas Rintangan Eksternal dalam Proyek Infrastruktur: Studi Kasus Proyek Tol Gempol-Pasuruan". *Journal of Public Administration and Policy Review*, 3(1), 1-12.
- Mishra, A. K., & Raghuvanshi, G. S. (2020). "Infrastructure development, economic growth and poverty reduction in India: Trends and challenges". *Journal of Public Affairs*, 20(2), e2049.
- Kusuma, I. G. A. M., & Sari, N. N. (2020). "Diversifikasi Sumber Dana untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". *JELP (Journal of Economics Literature and Policy)*, 1(2), 6778.
- Miles, B. (2017). "Governing infrastructure in the era of populist politics". *Public Administration Review*, 77(2), 179-183.
- Verdant, F., & Bello, W. (2017). "How to kill a megaproject: The case of the TAV in Italy". *Critical Sociology*, 43(4-5), 677-694.
- Kurniasari, D. A., & Adhi, G. A. (2019). "Analisis Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Moneter*, 2(2), 164-174.
- Kuncoro, M. (2017). "Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 56-71.